

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat pendahuluan yang terdiri atas latar belakang penelitian, identifikasi dan rumusan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta struktur isi disertasi. Penjelasan mengenai setiap bagian diuraikan sebagai berikut.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan profesi Bimbingan dan Konseling (BK) telah bergeser dari penekanan kejuruan menjadi pendekatan sistemik, dan komprehensif yang menekankan pada standar praktik nasional (ASCA, 2015; Kratsa, 2019; Lambie & Williamson, 2004). Pergeseran tersebut mencerminkan peningkatan peran guru bimbingan dan konseling dalam mendukung perkembangan siswa secara holistik tidak hanya mencakup aspek karir tetapi juga aspek pribadi, sosial, dan belajar. Fokus pendekatan yang berubah mengharuskan guru bimbingan dan konseling mengadopsi paradigma baru untuk mengedepankan peran diantaranya sebagai kolaborator, keadilan sosial, kemampuan menggunakan data dan teknologi, mediator, konsultan, advokasi, pemimpin atau agen perubahan sistemik dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling sehingga mampu meningkatkan legitimasi guru bimbingan dan konseling di sekolah (C. A. Dahir, 2009; Paisley, P & McMahon H.G, 2001).

Akuntabilitas berada di garis depan dialog profesional, artinya akuntabilitas tidak lagi menjadi isu, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Tujuan penyelenggaraan bimbingan dan konseling membantu siswa mencapai perkembangan diri yang optimal, mandiri, sukses, sejahtera, dan bahagia dalam kehidupannya, sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Agar tujuan tercapai, guru bimbingan dan konseling tidak hanya diminta untuk menceritakan apa yang telah dikerjakan, tetapi juga diminta untuk membuktikan peran guru bimbingan dan konseling memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan keberhasilan siswa (C. Dahir & Stone, 2003; Gysbers, 2004; Gysbers &

Henderson, 2014; Myrick, 2011; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Dan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah., 2014; Sink, 2009).

Menurut *American School Counselor Association* (ASCA, 2015) akuntabilitas adalah komitmen konselor untuk menunjukkan efektivitas program konseling melalui pendekatan berbasis data yang sistematis. Pendekatan mencakup tiga komponen utama: laporan hasil, standar kinerja konselor sekolah, dan audit program. Stone & Dahir (2015) memperluas konsep akuntabilitas mencakup upaya konselor untuk menyelaraskan misi layanan konseling dengan misi sekolah, mengumpulkan dan menganalisis data penting untuk mendukung peningkatan kinerja siswa, melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program, serta menginformasikan hasil kepada pemangku kepentingan. Loesch & Ritchie (2005) mendefinisikan akuntabilitas sebagai komitmen untuk memvalidasi dan mendokumentasikan efektivitas kerja profesional konselor, yang selaras dengan tujuan pendidikan dan berdampak pada keberhasilan siswa.

Myric (2011) menambahkan akuntabilitas melibatkan proses terintegrasi yang mencakup penetapan tujuan, pelaksanaan program, serta penggunaan hasil untuk meningkatkan kualitas layanan. Berdasarkan pendapat ahli dapat disimpulkan akuntabilitas adalah upaya sistematis konselor untuk memastikan bahwa layanan bimbingan dan konseling tidak hanya relevan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perkembangan siswa baik dalam bidang akademik, pribadi, sosial, maupun karir. Kegiatan akuntabilitas melibatkan pengumpulan data yang terstruktur, analisis hasil, dan pelaporan yang transparan kepada pemangku kepentingan. Dengan pendekatan berbasis data yang terukur, akuntabilitas guru BK tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling, tetapi juga memperkuat legitimasi peran guru bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari sistem pendidikan yang mendukung perkembangan optimal siswa.

Orientasi praktik akuntabilitas bukan hanya terbatas pada pencatatan waktu yang dihabiskan oleh guru bimbingan dan konseling dalam melaksanakan tugasnya

atau penjadwalan jumlah layanan yang diberikan, seperti kapan dan seberapa banyak layanan klasikal maupun bimbingan kelompok yang diselenggarakan, jumlah peserta didik yang menerima layanan konseling baik individu maupun kelompok, atau konferensi kasus bersama orang tua. Sebaliknya, akuntabilitas menekankan tanggung jawab dalam menyediakan informasi yang menunjukkan kemampuan guru BK untuk mengelola data penting secara positif sebagai hasil dari efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Guru bimbingan dan konseling diharapkan dapat menunjukkan dampak dari keberhasilan atau kegagalan program yang dilaksanakan, sekaligus memastikan bahwa program BK selaras dengan misi sekolah untuk mendukung peningkatan prestasi akademik siswa, termasuk publikasi berkala kepada pemangku kepentingan mengenai bagaimana siswa mengalami perubahan sebagai hasil dari program yang dilaksanakan oleh guru BK. (Badrujaman et al., 2018; C. A. Dahir, 2009; C. A. Dahir & Stone, 2003; Edwards, 2009; L. C. Loesch, 2007; White, 2007).

Praktik akuntabilitas dalam layanan bimbingan dan konseling di Indonesia belum menjadi fokus utama jika dibandingkan dengan di Amerika Serikat, di mana akuntabilitas telah menjadi pilar penting dalam praktik guru bimbingan dan konseling. Kebijakan *No Child Left Behind (NCLB) Act* 2001 menjadi dasar bagi pengembangan model Nasional ASCA dalam mendemonstrasikan akuntabilitas guru bimbingan dan konseling. Model nasional ASCA secara tegas mengintegrasikan penggunaan data berbasis bukti untuk mengevaluasi efektivitas layanan konseling, memastikan bahwa program bimbingan dan konseling selaras dengan misi akademik sekolah. Melalui pendekatan yang sistematis, seperti pengumpulan, analisis, dan pelaporan data, ASCA National Model memastikan bahwa layanan konseling tidak hanya mendukung keberhasilan siswa, tetapi juga berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan pendidikan (ASCA, 2012; C. Dahir & Stone, 2003).

Berbeda dengan di Indonesia berdasarkan kajian terhadap regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 111 Tahun 2014 akuntabilitas dalam layanan bimbingan dan konseling belum secara eksplisit diatur sebagai bagian integral yang berbasis data dan berorientasi pada hasil.

Regulasi lebih menekankan pada prosedur administratif, seperti perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan, tanpa memberikan panduan khusus mengenai cara guru bimbingan dan konseling mendemonstrasikan dampak layanan terhadap keberhasilan siswa. Akuntabilitas lebih diarahkan pada evaluasi program secara umum, tanpa penekanan pada penggunaan data berbasis bukti untuk menunjukkan efektivitas layanan atau kontribusi langsung terhadap perkembangan siswa dalam aspek akademik, pribadi, sosial dan karier.

Hasil studi pendahuluan bertujuan untuk memahami implementasi akuntabilitas dalam praktik pelaporan program bimbingan dan konseling oleh guru bimbingan dan konseling di lapangan. Survei daring menggunakan *google form* dilakukan selama periode Mei hingga Agustus 2023, melibatkan 140 guru BK dari tujuh provinsi di Indonesia pada jenjang SMA, SMP, dan SMK. Partisipasi dilakukan secara sukarela, dengan fokus untuk mengevaluasi frekuensi pelaporan program kepada kepala sekolah. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas guru BK (96 responden atau 68,57%) secara rutin melaporkan pelaksanaan program, 36 responden (25,71%) jarang melaporkan, dan 8 responden (5,71%) tidak pernah melaporkan.

Hasil studi pendahuluan memberikan gambaran awal mengenai praktik akuntabilitas guru BK, khususnya dalam aspek pelaporan program, yang masih memerlukan kajian lebih mendalam untuk memahami orientasi dan efektivitas pelaksanaannya. Untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana akuntabilitas diterapkan dalam praktik sehari-hari, hasil survei ditindaklanjuti dengan pelaksanaan *Focus Group Discussion (FGD)*. Diskusi kelompok dirancang untuk mengeksplorasi persepsi guru BK tentang akuntabilitas, tantangan yang dihadapi, serta kebutuhan untuk meningkatkan praktik akuntabilitas dalam layanan bimbingan dan konseling. Kegiatan FGD melibatkan delapan guru bimbingan dan konseling SMA kota Semarang yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2024.

Hasil diskusi mengungkapkan laporan yang disampaikan kepada kepala sekolah umumnya hanya mencakup deskripsi aktivitas tanpa mencakup dampak layanan terhadap siswa. Salah satu peserta, guru BK berinisial SY, menyatakan, “*Kami biasanya membuat laporan dalam bentuk dokumen, tetapi tidak*

menggunakan data akademik atau perilaku siswa untuk mengevaluasi dampak layanan” (SY/FGD/24/04/2024). Pernyataan tersebut menegaskan praktik akuntabilitas masih terbatas pada pelaporan administratif dan belum berorientasi pada hasil yang berbasis data. Berdasarkan survei dan FGD praktik akuntabilitas yang diterapkan oleh guru bimbingan dan konseling masih berada pada tahap yang bersifat prosedural dan rutinitas, belum beranjak menuju akuntabilitas berbasis hasil yang menekankan layanan yang berdampak. Oleh karena itu, penting untuk mendorong perubahan pada praktik akuntabilitas guru bimbingan dan konseling yang bukan hanya berfungsi sebagai pelaporan pelaksanaan program, tetapi juga mencakup pelaporan berbasis bukti. Kegiatan pelaporan administratif harus dimaknai sebagai bagian integral dari akuntabilitas yang berbasis data untuk mendokumentasikan dan melaporkan keefektifan program bimbingan dan konseling. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga alat untuk mengevaluasi dampak nyata layanan terhadap pencapaian siswa (ASCA, 2012; Whiston, 2017).

Hasil kajian literatur lainya menunjukkan belum semua guru bimbingan dan konseling mampu menunjukkan akuntabilitas disebabkan minimnya pemahaman tentang cara melakukan akuntabilitas sehingga memiliki pemikiran bahwa akuntabilitas sesuatu yang sulit dan rumit, takut akan konsekuensi negatif yang diberikan, kurangnya sumberdaya manusia adanya kekhawatiran akan data yang dimiliki tidak relevan, kurang waktu untuk mengerjakannya karena terlalu banyak kasus yang dilayani, tidak ada dukungan administrasi, tidak mahir dalam melakukan penelitian, peran dan tanggung jawab yang tidak jelas, kurangnya kepercayaan diri konselor sekolah untuk bekerja berbasis data dan menginformasikannya kepada orang tua wali dan *stakeholder* sekolah (Amy & McCormick, 2015; Astramovich & Coker, 2007; Badrujaman et al., 2015; Edwards, 2009; Fairchild, 1993; Isaacs, 2003; Paolini & Topdemir, 2013; Topdemir, 2010). Hasil studi literatur mendukung temuan hasil studi awal peneliti mengenai hambatan yang dialami oleh guru BK sehingga belum melakukan praktik akuntabilitas diantaranya 46% menjawab belum adanya prosedur akuntabilitas

yang bisa dicontoh, sebesar 40,6% banyak beban tugas non bimbingan dan konseling, serta sebesar 37,5 % menghabiskan banyak waktu.

Mendemonstrasikan akuntabilitas memungkinkan guru bimbingan dan konseling dapat menunjukkan kontribusi secara terukur sebagai bagian dari program sekolah. Hasil riset Sink (2009) mengungkapkan guru bimbingan dan konseling mampu menunjukkan akuntabilitas maka akan membantu meyakinkan siswa, orangtua, guru, administrator, dan masyarakat umum terhadap manfaat yang diperoleh dari kualitas program bimbingan dan konseling. Ironi, ketika guru bimbingan dan konseling idealnya memiliki kemampuan dalam mendokumentasikan efektivitas program melalui praktik akuntabilitas kenyataannya masih dalam bentuk harapan. Hasil penelitian lain rendahnya kepercayaan guru mata pelajaran terhadap guru bimbingan dan konseling disebabkan oleh kurangnya pertanggungjawaban yang jelas sehingga memunculkan persepsi negatif terhadap peran guru bimbingan dan konseling. Selain itu, guru bimbingan dan konseling belum mampu menunjukkan rasa percaya diri dalam menyampaikan esensi program kepada peserta didik, sehingga banyak siswa enggan mengikuti layanan. Keberadaan guru bimbingan dan konseling pun sering dianggap hanya sebagai pelengkap administratif, terutama saat proses akreditasi (Buchori, 2001; Mujiyati et al., 2020).

Praktik akuntabilitas yang baik sangat tergantung pada keterampilan guru bimbingan dan konseling dalam melakukan evaluasi. Kegiatan evaluasi merupakan kondisi yang perlu dilakukan untuk mencapai praktik akuntabilitas. Evaluasi merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi tentang suatu program atau intervensi secara teratur dan terencana untuk membuat keputusan. Tujuan evaluasi adalah diperolehnya informasi yang dapat digunakan untuk membuat penilaian yang lebih baik dan keputusan berikutnya tentang apa yang sedang dilakukan dan apakah itu berhasil atau tidak (Dimmitt et al., 2007; Gysbers & Henderson, 2014). Pelaksanaan kegiatan evaluasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan guru BK dalam menggunakan data.

Penggunaan data telah menjadi landasan praktik dalam penyelenggaraan program bimbingan dan konseling komprehensif yang efektif karena

memungkinkan guru BK untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian dan kemudian mengevaluasi efek dari perbaikan (ASCA, 2012; Astramovich, 2016; Dimmitt et al., 2007; Poynton & Carey, 2006; Sink, 2009). ASCA (2005) menyatakan bahwa penggunaan data oleh konselor sekolah sangat penting untuk terlibat dalam praktik konseling sekolah yang efektif. Secara umum, data dapat digunakan dengan dalam tiga domain utama yaitu guru BK dapat menggunakan data untuk memandu pengembangan program melalui asesmen kebutuhan, data dapat digunakan untuk mengevaluasi keefektifan program dan data juga bisa untuk mengetahui performansi guru BK (Erford & Erford, 2019; L. C. Loesch, 2007). Secara praktis, data dapat digunakan untuk memandu kegiatan evaluasi sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dan data dapat memberikan informasi akuntabilitas.

Evaluasi yang berorientasi pada praktik akuntabilitas kenyataan di Indonesia masih menjadi komponen yang lemah bagi guru bimbingan dan konseling. Hasil penelitian menunjukkan 52% pelaksanaan layanan BK masih kurang maksimal, 7,41 % program BK belum terlaksana, kurang dari 20 % konselor sekolah belum melakukan evaluasi program. Salah satu factor penyebabnya adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman konselor sekolah terhadap konsep dan praksis evaluasi dalam kategori rendah yaitu 28% (Badrujaman et al., 2015; Fauziyah, 2016; Priciliasari et al., 2019; Rachmalia, 2006; Suastini et al., 2013; Yusuf, 2014). Temuan mendukung data awal yang dikumpulkan oleh peneliti menunjukkan 43% guru BK SMA di kota Semarang mengalami kesulitan dalam melakukan evaluasi hasil/dampak layanan bimbingan dan konseling.

Evaluasi program konseling belum banyak dilakukan karena kurangnya pengetahuan terkait penilaian dan minimnya tenaga guru bimbingan dan konseling di sekolah, ketidakmampuan konselor melakukan evaluasi, minimnya minat guru bimbingan dan konseling untuk belajar melakukan evaluasi program layanan bimbingan konseling, dan minimnya pelatihan yang diberikan kepada konselor untuk mengevaluasi program layanan bimbingan dan konseling (Azizah et al., 2017). Esensi kegiatan evaluasi program bimbingan dan konseling sejatinya membantu guru bimbingan dan konseling dengan memberikan data

pertanggungjawaban kepada *stakeholder*, menghasilkan *feedback* tentang efektivitas program dan efektivitas layanan institusional, melalui pemeriksaan komponen, metodologi, dan hasil yang cermat dan sistematis (Dahir, 2009). Guru bimbingan dan konseling yang mampu melakukan evaluasi berarti mampu menunjukkan kinerja yang akuntabel sehingga berdampak adanya tingkat kepercayaan *stakeholder* terhadap program yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan kajian literatur, ada tujuh cara evaluasi berorientasi dampak (*data-driven evaluation*) yang menunjang praktik akuntabilitas. Pertama, *Accountability Bridge Model* (ABM) yang dikembangkan oleh Randall L. Astramovich dan J. Kelly Coker pada tahun 2007 menekankan komunikasi hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan untuk mempertahankan dukungan dan meningkatkan permintaan terhadap layanan konselor sekolah. Di Indonesia, model ABM telah diterapkan dan terbukti mampu meningkatkan akuntabilitas guru BK di SMA se-Lampung, meskipun masih kurang efektif pada aspek pengembangan program dan penyimpulan hasil evaluasi (Mujiyati, 2022). Kedua, *Context, Input, Process, Product* (CIPP) Model yang dirancang oleh Daniel Stufflebeam pada 1960-an menawarkan evaluasi komprehensif melalui analisis konteks, input, proses, dan produk. Model CIPP sering digunakan untuk mengevaluasi layanan bimbingan dan konseling di Indonesia. Implementasi model CIPP digunakan untuk mengevaluasi layanan informasi (Muyana, 2017; Sudiby, 2013), layanan konseling individu (Hakim, 2023; Hidayah, 2021; Nisya, 2021), program BK bidang pribadi sosial (Budiman et al., 2022) serta program BK (Pristanti, Nindya Ayu, 2023; Putra & Nusantoro, 2015; Setiawan, 2019; Sugiyo, 2018; Sulton, 2018). Meskipun demikian model CIPP cenderung administratif, kompleks, dan kurang efisien

Ketiga, *Transformative Individual School Counseling Model* (TISC), yang dikembangkan oleh Robert Eschenauer dan Chen-Hayes, berfokus pada pemberdayaan siswa melalui pendekatan berbasis kekuatan (*strength-based approach*) dan transformasi sistemik di sekolah. Meskipun model efektif dalam mendukung pengembangan personal siswa, fokusnya lebih pada dampak individu daripada akuntabilitas berbasis data. Keempat, *Data-Driven Decision Making: The Engine of Accountability*, yang dikembangkan oleh Madelyn L. Isaacs (2003)

menempatkan data sebagai inti dari akuntabilitas. Model yang dikemukakan Isaacs mendorong pengumpulan, analisis, dan penggunaan data untuk meningkatkan layanan konseling, tetapi membutuhkan pelatihan intensif dan dukungan teknologi yang memadai. Kelima, *IDEAS Data-Based Decision-Making Model*, yang dirancang oleh Poynton dan Carey (2006) membantu guru bimbingan dan konseling dalam membuat keputusan yang relevan berdasarkan data, meskipun pelaksanaannya membutuhkan keterampilan analisis data yang tinggi.

Keenam, *A Model for Evidence-Based Elementary School Counseling*, diperkenalkan oleh Carey Dimmitt dan John Carey (2008) yang berfokus pada konseling berbasis bukti untuk sekolah dasar, Meskipun bermanfaat pada konteks pendidikan dasar, model kurang relevan untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ketujuh, *MEASURE (Mission, Elements, Analyze, Stakeholders-Unify, Results, Educate)*, yang dikembangkan oleh Dahir dan Stone (2003), menawarkan kerangka evaluasi yang sistematis untuk menghubungkan misi program dengan hasil terukur. *MEASURE* memungkinkan guru BK untuk mengukur efektivitas layanan, melibatkan pemangku kepentingan, dan menyelaraskan program dengan tujuan sekolah secara sederhana dan fleksibel (Carey & Dimmitt, 2008; C. A. Dahir & Stone, 2003; Dimmitt et al., 2007; Eschenauer & Chen-Hayes, 2005; Isaacs, 2003; Mehlos, 2009; Stone, Carolyn B; Dahir, 2011).

Di Indonesia belum banyak kerangka kerja khusus mengenai evaluasi berbasis data yang mengarah pada praktik akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Satu-satunya pedoman operasional yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan evaluasi program bimbingan dan konseling terdapat di dalam Pedoman Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling (POP BK) baik di jenjang SD - SMA yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan DITJEN GTK (Kemdikbud, 2016). Meskipun POP BK memberikan kerangka kerja yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut, POP BK belum menjelaskan secara detail sistem evaluasi berbasis data yang terukur. Akibatnya, kontribusi guru BK dalam mendukung pencapaian siswa sulit untuk diidentifikasi secara terukur.

Asesmen dan evaluasi yang di jelaskan di dalam POP BK masih mengutamakan penggunaan data persepsi daripada data dampak. Data persepsi penting namun tidak cukup untuk menjawab pertanyaan bagaimana siswa berbeda sebagai hasil dari program yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling?. Data persepsi hanya mencerminkan pengalaman, opini, atau tingkat kepuasan siswa terhadap layanan, informasi, namun belum mampu menunjukkan perubahan konkret yang terjadi pada siswa sebagai hasil langsung dari program BK. Untuk menunjukkan akuntabilitas yang lebih kuat, diperlukan data dampak yang menggambarkan hubungan langsung antara layanan yang diberikan dengan hasil yang terukur, seperti peningkatan prestasi akademik, pengurangan masalah disiplin, atau peningkatan kehadiran siswa (Bemak et al., 2014; C. A. Dahir & Stone, 2011). Tanpa data dampak sulit bagi guru BK untuk membuktikan efektivitas layanan dalam mendukung keberhasilan siswa dan mencapai tujuan pendidikan. Pendekatan evaluasi yang menggabungkan data persepsi dan data dampak menjadi penting untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan menjawab pertanyaan tentang sejauh mana program bimbingan dan konseling benar-benar berdampak pada siswa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, diperlukan pengembangan kerangka kerja evaluasi berbasis data yang berorientasi pada solusi aplikatif dan relevan dengan kebutuhan guru BK. Kerangka kerja dirancang agar dapat diintegrasikan secara efektif dengan POP BK, memberikan panduan yang sistematis untuk mengevaluasi program dan layanan bimbingan dan konseling. Salah satu pendekatan yang dianggap adaptif dan relevan untuk mendukung tujuan tersebut adalah MEASURE (*Mission, Elements, Analyze, Stakeholders-Unite, Results, Educate*). MEASURE telah diujikan kepada 175 konselor sekolah di Amerika mulai dari sekolah dasar dan menengah dengan hasil penelitian menunjukkan konselor mampu menunjukkan praktik akuntabilitas dengan bukti kinerja konselor sekolah memberikan dampak positif terhadap prestasi akademik siswa (C. A. Dahir & Stone, 2009). Di Indonesia secara konseptual MEASURE telah dikenalkan hanya saja dalam implementasi belum ada literatur yang menjelaskan efektivitas MEASURE dalam meningkatkan praktik akuntabilitas guru BK (Budhi Handaka I., 2017; Fatimah, 2020; Mujiyati et al., 2020; Nugraha & Rohiman, 2017; Putri et al., 2018).

Dasar pertimbangan mengembangkan kerangka kerja evaluasi program berbasis MEASURE diantaranya adalah pertama MEASURE merupakan prosedur sistematis dan terorganisir menawarkan cara bagi guru bimbingan dan konseling untuk mengidentifikasi masalah dan mengukur hasil, memastikan bahwa layanan konseling dapat menunjukkan hasil yang konkret dan terukur. kedua MEASURE dapat membantu guru bimbingan dan konseling dalam menggerakkan elemen data penting ke arah positif dalam membantu keberhasilan siswa. Ketiga prosedur MEASURE secara proaktif dan dengan sengaja mendorong upaya kolaboratif yang dipimpin guru bimbingan dan konseling yang berfokus pada data dan hasil. Keempat prosedur utama dalam MEASURE dirancang untuk mendorong penggunaan data sebagai dasar dalam implementasi program Bimbingan dan Konseling (BK) komprehensif berbasis bukti. Dengan mengandalkan data dan hasil yang relevan, program BK dapat memberikan informasi yang bermakna dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan, seperti kepala sekolah, wali kelas, orang tua, dan siswa. Ketika program BK mampu menunjukkan dampak nyata melalui pendekatan berbasis data, layanan yang diberikan oleh guru BK akan dianggap efektif, relevan, dan bertanggung jawab dalam mendukung keberhasilan siswa di sekolah.

Kelima prosedur dalam MEASURE memiliki peran spesifik yang saling melengkapi untuk menciptakan evaluasi program yang terintegrasi, mulai dari menyelaraskan misi BK dengan misi sekolah, mengidentifikasi elemen data penting, menganalisis hambatan siswa, melibatkan stakeholder, hingga mendokumentasikan hasil layanan secara sistematis. Pengintegrasian MEASURE ke dalam POP BK memastikan bahwa program BK tidak hanya responsif terhadap kebutuhan siswa tetapi juga akuntabel terhadap pencapaian yang diharapkan. Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka judul disertasi peneliti adalah pengembangan Kerangka Kerja Evaluasi Berbasis MEASURE (KKEB-MEASURE) untuk meningkatkan praktik akuntabilitas guru Bimbingan dan Konseling di SMA Kota Semarang.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian

Kebutuhan praktik akuntabilitas menjadi sebuah tantangan bagi konselor sekolah untuk mendokumentasikan dampak dan efektivitas layanan konseling sekolah guna memberikan akuntabilitas kepada stakeholders. Guru BK diharapkan tidak hanya mampu melakukan praktik terbaik tetapi juga mampu menunjukkan dampak atas kinerja berbasis bukti dalam mengerakkan data penting ke arah positif yang menunjang keberhasilan peserta didik. Pentingnya kemampuan di dalam menggunakan data, merancang intervensi yang tepat berbasis data, serta kemampuan kolaborasi bersama stakeholder, dan kemampuan untuk menunjukkan dampak keberhasilan siswa berbasis bukti merupakan kunci kredibilitas guru bimbingan dan konseling dalam mewujudkan akuntabilitas. Berdasarkan pada penjelasan tersebut maka dibutuhkan pengembangan Kerangka Kerja Evaluasi Berbasis MEASURE (KKEBMEASURE) untuk meningkatkan praktik akuntabilitas guru Bimbingan dan Konseling di SMA Kota Semarang.

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah di jelaskan, guru bimbingan dan konseling mendapatkan sebuah tantangan untuk bekerja berbasis data dan mampu melakukan akuntabilitas atas kinerja yang telah dilakukan untuk menunjukkan bahwa layanan bimbingan dan konseling memberikan berdampak pada keberhasilan siswa. Fenomena menunjukkan belum semua konselor sekolah mampu menunjukkan akuntabilitas diantaranya dikarenakan minimnya pemahaman tentang cara melakukan evaluasi sehingga tidak mampu menunjukkan akuntabilitas, tidak mengetahui apa yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, adanya kekhawatiran akan data yang dimiliki tidak relevan, kurang waktu untuk mengerjakannya, mendapat konsekuensi negatif, kurangnya kepercayaan diri konselor sekolah untuk bekerja berbasis data dan hasil. Kondisi diperburuk dengan ketiadaan kerangka evaluasi program berbasis data hasil yang dapat menjadi panduan mendemonstrasikan akuntabilitas bagi guru BK SMA Negeri di Kota Semarang. Belum maksimalnya di dalam mendemonstrasikan akuntabilitas berdampak terhadap eksistensi guru BK di lapangan misalnya mosi tidak percaya atas kinerja BK, menganggap guru BK tidak ada pekerjaan sehingga berdampak pada pengalihan fungsi peran misalnya BK sebagai petugas tata tertib, bendahara sekolah, pengganti guru mata pelajaran yang berhalangan hadir.

Kerangka kerja evaluasi program berbasis MEASURE merupakan sebuah prosedur sistematis untuk mengatur penggunaan data sebagai kebutuhan akan akuntabilitas. Kerangka kerja evaluasi program berbasis MEASURE dianggap mampu untuk meningkatkan praktik akuntabilitas guru BK karena di dalam prosesnya memperhatikan empat hal penting. Pertama, KKEB-MEASURE sistematis disetiap tahapannya sehingga guru bimbingan dan konseling mengetahui apa saja yang harus dilakukan guna mendukung praktik akuntabilitas. Kedua KKEB-MEASURE memberikan kekhususan tentang bagaimana data akuntabilitas dihasilkan sehingga guru BK akan memiliki keterampilan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data bahkan sampai pada menginformasikan data penting untuk perbaikan program/layanan yang berdampak kepada keberhasilan siswa. Ke tiga KKEB-MEASURE menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, pelaporan serta tindaklanjut yang mana masing- masing memiliki tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu keberhasilan siswa.

Berdasarkan identifikasi masalah maka rumusan masalah penelitian utama adalah Mengembangkan Kerangka Kerja evaluasi berbasis MEASURE (KKEBMEASURE) yang terintegrasi di dalam POP BK untuk membantu guru BK dalam meningkatkan praktik akuntabilitas guru BK SMAN di Kota Semarang. Rumusan masalah utama secara rinci diturunkan menjadi pertanyaan penelitian secara khusus yaitu:

1. Seperti apa profil akuntabilitas guru BK SMA di kota Semarang?
2. Bagaimana Rumusan Kerangka Kerja Evaluasi program berbasis MEASURE yang terintegrasi di dalam POP BK?
3. Apakah Kerangka Kerja evaluasi program berbasis MEASURE (KKEBMEASURE) yang terintegrasi di dalam POP BK efektif terhadap praktik akuntabilitas guru Bimbingan dan Konseling?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian adalah menghasilkan kerangka kerja evaluasi program berbasis MEASURE (KKEBMEASURE) untuk meningkatkan akuntabilitas guru bimbingan dan konseling. Tujuan khusus penelitian adalah:

1. Menganalisis profil akuntabilitas guru bimbingan dan konseling SMA di kota Semarang.
2. Menghasilkan kerangka kerja evaluasi program berbasis MEASURE (KKEBMEASURE) yang terintegrasi di dalam POP BK.
3. Menguji efektivitas Kerangka Kerja evaluasi program berbasis MEASURE (KKEBMEASURE) yang terintegrasi di dalam POP BK terhadap praktik akuntabilitas guru bimbingan dan konseling Sekolah Menengah Atas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian dibagi menjadi dua manfaat secara teoritis dan praksis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian berkontribusi pada pengembangan konsep akuntabilitas dalam konteks bimbingan dan konseling, khususnya melalui kerangka kerja MEASURE yang diadaptasi untuk konteks Indonesia. Secara teoretis, penelitian memperkaya literatur terkait pendekatan berbasis data dalam akuntabilitas guru bimbingan dan konseling, serta memberikan dasar ilmiah bagi pengembangan evaluasi yang terintegrasi dengan Pedoman Operasional Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling (POP BK).
- b. Kerangka Kerja evaluasi program berbasis MEASURE (KKEBMEASURE) dapat menambah khasanah teoritik dalam mata kuliah manajemen dan evaluasi bimbingan dan konseling

1.4.2 Manfaat Praksis

- a. Bagi guru bimbingan dan konseling pertama, KKEBMEASURE memberikan panduan praktis kepada guru BK dalam mengimplementasikan akuntabilitas berbasis data yang relevan dengan kebutuhan sekolah. Kedua, Membantu guru BK meningkatkan kemampuan untuk mendokumentasikan dan menunjukkan dampak

- nyata layanan mereka terhadap keberhasilan siswa, baik dari aspek akademik, pribadi, sosial dan karir. Ketiga, meningkatkan kredibilitas profesional guru bimbingan dan konseling di mata pemangku kepentingan melalui kerangka kerja yang sistematis dan berbasis hasil.
- b. Bagi Pendidik Calon Guru Bimbingan dan Konseling di Perguruan Tinggi. Pertama, kerangka kerja evaluasi program berbasis MEASURE (KKEBMEASURE) dapat menjadi rekomendasi untuk dapat dilatihkan kepada mahasiswa pada mata kuliah manajemen dan evaluasi program bimbingan dan konseling. Kedua Membantu pendidik dalam mempersiapkan calon guru BK agar memiliki kompetensi dalam mengelola data, merancang layanan berbasis bukti, dan menerapkan akuntabilitas yang relevan dengan kebutuhan Pendidikan. Ketiga, menjadi dasar untuk merancang kurikulum yang lebih responsif terhadap tuntutan akuntabilitas berbasis hasil dalam layanan bimbingan dan konseling.
 - c. Bagi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN). Pertama, Kerangka Kerja evaluasi program berbasis MEASURE (KKEBMEASURE) dapat menjadi rekomendasi pengembangan POP BK untuk memudahkan guru BK dalam melaksanakan evaluasi yang berorientasi pada akuntabilitas. Kedua, mendukung upaya ABKIN dalam menyusun kebijakan, pelatihan, dan pendampingan untuk memperkuat akuntabilitas guru BK di Indonesia.

1.5 Struktur Isi Disertasi

Disertasi yang dibuat oleh peneliti mempunyai lima struktur Bab. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: Bab I adalah pendahuluan, menjelaskan latar belakang penelitian, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis dan struktur isi. Bab II adalah Kajian Pustaka, pada bab II ini peneliti menjelaskan tentang kajian filsafat akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling, kajian historis akuntabilitas sekolah dan bimbingan dan konseling,

Konstruk akuntabilitas, Faktor – faktor yang mempengaruhi praktik akuntabilitas, Konsep Pengambilan Keputusan Berbasis Data, Analisis berbagai model evaluasi yang berorientasi akuntabilitas, serta kerangka konsep kerangka kerja evaluasi program berbasis MEASURE untuk meningkatkan akuntabilitas guru bimbingan dan konseling. Bab III adalah Metode Penelitian yang menjelaskan tentang desain penelitian yang digunakan, populasi dan sampel penelitian, instrumen penelitian, prosedur penelitian dan analisis data. Bab IV Pembahasan yang menjelaskan hasil temuan penelitian. Pertama, deskripsi profil akuntabilitas guru BK di SMA Kota Semarang. Kedua, rumusan kerangka kerja evaluasi program berbasis MEASURE. Ketiga, hasil uji efektivitas Kerangka Kerja evaluasi program berbasis MEASURE dalam meningkatkan praktik akuntabilitas guru BK di SMA kota Semarang. Bab V menjelaskan tentang kesimpulan hasil temuan penelitian serta rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.